

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Athar Haqqa Hendrada

NPP. 29.1133

*Asdaf Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: atharhendrada29@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is entitled about the implementation of the Covid-19 pandemic social assistance policy by the Berau District Social Service, East Kalimantan Province where this occurred during the Covid-19 pandemic and the Social Service made a policy to provide social assistance to those who are entitled but there are obstacles, namely transparency and inequality. the distribution of this assistance to the population so that there are residents who are in the capable category but receive assistance from the government. **Purpose:** This study was compiled to determine the implementation of the Covid-19 Social Assistance carried out by the Berau District Social Service. Since the Covid-19 pandemic hit our beloved country Indonesia, this has caused a lot of losses in every aspect of life, especially in the economic sector, the Enforcement of Restrictions on Community Activities or better known as PPKM implemented by the government to suppress the spread of the Covid-19 virus, the spread of The Covid-19 virus has greatly impacted society, many people have lost their livelihoods, lost assets and even lost family members due to exposure to the Covid-19 virus. This immediately received special attention from the government, as evidenced by the refocusing of the budget that was diverted to people affected by the Covid-19 virus. **Method:** In this study, the authors used a qualitative descriptive research method, with interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Analysis of the Implementation of Covid-19 Social Assistance by the Berau District Social Service using the theory from Merilee S. Grindle regarding the distribution of the Covid-19 Pandemic Social Assistance by the Berau District Social Service. **Result:** The results showed that the Berau District Social Service was able to carry out the distribution of social assistance well. **Conclusion:** Berau by the Social Service, but in its implementation there are still some shortcomings such as the lack of apparatus resources, thus affecting the effectiveness and efficiency in the implementation of activities, as well as the lack of facilities and infrastructure assistance from the local government, even though the Social Service personnel always provide maximum service for community in need. **Keywords:** Implementation, Covid-19, Social Assistance, Social Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dimana ini terjadi selama pandemi Covid-19 dan Dinas Sosial membuat kebijakan untuk memberikan bantuan sosial kepada yang berhak namun terdapat kendala yakni mengenai transparansi juga tentang tidak meratanya pembagian bantuan ini pada penduduk sehingga terdapat penduduk yang masuk dalam kategori mampu namun menerima bantuan dari pemerintah. **Tujuan:** Penelitian ini disusun untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan Sosial Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau. Sejak melandanya pandemi Covid-19 di negara kita tercinta Indonesia, hal ini menyebabkan banyak sekali kerugian di setiap aspek kehidupan terutama pada sektor ekonomi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran virus Covid-19, penyebaran virus Covid-19 sangat berdampak pada masyarakat, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan aset bahkan banyak yang kehilangan anggota keluarga karena terpapar virus Covid-19. Hal ini langsung mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, terbukti dengan adanya *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk masyarakat terdampak virus Covid-19. **Tujuan:** Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis Implementasi kebijakan bantuan Sosial Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau menggunakan Teori dari Merilee S. Grindle mengenai pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Berau dapat melaksanakan pendistribusian bantuan sosial dengan baik. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwasanya dengan telah baiknya pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Berau oleh Dinas Sosial, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan seperti sumber daya aparatur yang terbilang kurang, sehingga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta kurangnya bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah, meskipun begitu personil Dinas Sosial selalu memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Implementasi, Covid-19, Bantuan Sosial, Dinas Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak Covid-19 dengan penyebarannya virus tersebut sangat pesat. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menekan angka perkembangan Covid-19 ialah mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kemudian PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dilanjutkan PPKM darurat dengan level tingkatan. Penyebaran

Covid-19 di Indonesia sangat susah dikendalikan, hal ini dikarenakan sifat masyarakat Indonesia yang sangat suka dengan kebersamaan. Beragam kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan bersama-sama sehingga menimbulkan potensi berkerumun. Dan itu menjadi salah satu indikator yang menyebabkan kenaikan kasus Covid-19. Kabupaten Berau sendiri menempati urutan ke-4 dengan kasus penyebaran tertinggi di provinsi Kalimantan Timur, hal ini mengakibatkan Kabupaten Berau diharuskan memberlakukan PPKM level 4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial segera memberikan bantuan sosial berupa logistik ke kabupaten atau kota yang memberlakukan PPKM. Berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur HM Agus Hari Kesuma, disebutkan penyerahan bantuan APBD berupa beras 5 kg, telur ayam, mie instan, cornet daging 198 gr, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg, susu kental manis 370 gr. Kemudian bantuan dari dana APBN terdiri beberapa makanan siap saji, matras, family kit, tenda gulung, kids ware dan food ware, selimut dan kasur, peralatan. Pemerintah Kabupaten Berau dalam menangani dampak dari pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini salah satunya adalah memberikan Bantuan Sosial, namun dalam penyalurannya ada beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi, kendala tersebut mengenai transparansi juga tentang tidak meratanya pembagian bantuan ini pada penduduk sehingga terdapat penduduk yang masuk dalam kategori mampu namun menerima bantuan dari pemerintah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau sendiri menempati urutan ke-4 dengan kasus penyebaran tertinggi di provinsi Kalimantan Timur, hal ini mengakibatkan Kabupaten Berau diharuskan memberlakukan PPKM level 4 bersamaan dengan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 yang dilaksanakan secara berkepanjangan akhirnya memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial segera memberikan bantuan sosial berupa logistik ke kabupaten atau kota yang memberlakukan PPKM, terdapat lima daerah status level 4 yang kemudian akan diberikan bantuan dari dana APBD dan APBN di Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Berau dalam menangani dampak dari pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini salah satunya adalah memberikan Bantuan Sosial, namun dalam penyalurannya ada beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi, kendala tersebut mengenai transparansi juga tentang tidak meratanya pembagian bantuan ini pada penduduk sehingga terdapat penduduk yang masuk dalam kategori mampu namun menerima bantuan dari pemerintah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi maupun bantuan sosial masa pandemi. Penelitian pertama yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020* (Aldi Sajjan, 2021), pada penelitian pertama menggunakan metode

penelitian berupa penelitian kualitatif kemudian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai operasionalisasi konsep penelitian, kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat memperlihatkan bahwa, target ke implementasi kebijakan program BST di Kota Mataram terbilang sudah cukup efektif. Kemudian dilihat dari aspek prosedural, implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan sistem yang sudah ada, walaupun dalam nominal dana, program yang berjalan tidak sepenuhnya dapat menutupi kebutuhan bulanan mereka. Pada penelitian kedua yang dengan judul *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa* (Filsa Alviyanzah, 2019), pada penelitian kedua menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif, dengan pedoman teori Peran oleh Soerjono Soekanto sebagai operasionalisasi konsep penelitian, kemudian Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dinas Sosial bisa melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran, dari pemutakhiran data masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya wawasan penerima Bantuan Sosial dalam melakukan pendaftaran ataupun kejadian seperti kesalahan teknis yaitu lupa kode PIN. Pada penelitian ketiga yang berjudul *Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang* (Aji Dwi Utomo, Dr. Tri Yuliyanti, M.Si, dan Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si, 2020), penelitian ini menggunakan metode penelitian memakai metode penelitian kualitatif, menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle sebagai operasionalisasi konsep penelitian, kemudian hasil dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat bagus hal ini dikarenakan pelayanan yang baik dan maksimal oleh kecamatan, hal ini dilakukan pendataan yang menyeluruh, walaupun ada yang belum terdata karena terlewat hal ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Grindle mengenai teori implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk Implementasi kebijakan bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Sosial dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 3 kelompok sumber data yaitu *person*, *place*, dan *paper*. Adapun informan penelitian didapat dari teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* terdiri Kepala Dinas Sosial Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Perlindungan Bencana Alam dan Sosial, Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, dan masyarakat terdampak Covid. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipasi, serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Grindle mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi kebijakan bantuan sosial pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni pendapat dari Grindle mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Suatu kebijakan dibentuk oleh beberapakepentingan yang mendesak dan segera sehingga hadir ide dan gagasan mengikuti setiap kepentingan untuk suatu perubahan. Ide dan gagasan yang muncul itu kemudian datang dari berbagai pihak, yang kemudian saling melengkapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya Dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat kelas menengahkebawah, pemerintah telah mengeluarkan program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kartu Indonesia Sehat (KIS)), ketiga program bantuan sosial tersebut dapat disebut sebagai Bantuan Sosial Reguler yang artinya bantuan sosial tanpa adanya intervensi pandemi Covid-19. Kemudian setelah melandanya virus Covid-19 barulah pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Sosial yaitu BST namun telah diganti dengan program yang terbaru yaitu BPNT-PPKM, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat dengan kelas menengah kebawah.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Program dengan manfaat yang dirasakan hanya perorangan dapat memperburuk dan memunculkan persaingan di antara mereka yang mencari keuntungan dari adanya kebijakan itu dan mungkin lebih sulit untuk dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Program dengan konflik atau perbedaan pendapat akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Program atau kebijakan yang telah dibuat dan menjadi dasar dalam melakukan sebuah program tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini akan

didapatkan setelah kebijakan itu dilaksanakan, dan hasilnya akan dirasakan oleh perorangan maupun secara massa. Dalam pelaksanaannya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum dalam pelaksanaan program yang telah dibentuk pemerintah guna membantu masyarakat kelas menengah kebawah yang terdampak virus Covid-19, diharapkan masyarakat bisa memulai kehidupan baru dengan bantuan sosial yang telah diberikan, contohnya dapat dijadikan modal usaha, serta memenuhi kebutuhan harian

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Program yang dirancang demi mencapai tujuan jangka panjang mungkin akan lebih sulit untuk dilakukan daripada program yang keuntungannya dapat langsung tampak oleh penerima manfaat. Setiap kebijakan memiliki tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Maka dari itu, penting bagi semua *stakeholder* untuk melihat jangkauan perubahan yang diinginkan agar terdapat kesamaan visi untuk mencapai tujuan itu. Semakin jauh dan terjal keinginan itu hendak dicapai, maka semakin banyak pula cara dan hambatan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya efek perubahan yang ingin dicapai tentu saja adalah adanya stabilitas ekonomi bagi masyarakat kelas menengah kebawah, diharapkan dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kelas menengah kebawah atau yang membutuhkan. Mungkin bantuan sosial tersebut tidak sepenuhnya menutupi kebutuhan setiap hari namun diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang kesusahan karena dampak pandemi Covid-19 ini.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

kewenangan yang diberikan kepada pelaksana menjadi lebih banyak dan tersebar, baik secara geografis dan organisasi, tugas melaksanakan program tertentu menjadi lebih sulit, karena lebih banyaknya unit keputusan yang terlibat. Implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Kebijakan itu diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya bertindak sebagai penyalur dana BANSOS (Bantuan Sosial) Reguler dan BANSOS Covid-19 yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk disalurkan kepada masyarakat yang masuk dalam komponen indikator penerima bantuan sosial sesuai program yang diberikan dari pemerintah pusat dan daerah.

e. Implementor Program

Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan apakah pejabat politik dan administratif sepakat tentang tujuan yang akan dituju dapat menentukan pelaksanaan program tertentu. Implementasi kebijakan atau program yang harus dilaksanakan perlu didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten untuk menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya semua komponen berperan penting dalam melakukan penyaluran BANSOS untuk sampai kepada tangan masyarakat yang membutuhkan. Hubungan lintas sektoral yang sangat baik dan terkoordinir dengan lancar dalam

penanganan pendistribusian bantuan sosial. Setiap OPD telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan tugas yang diembannya secara baik.

f. Sumber Daya yang digunakan

Sumber daya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Berau terbilang sangat kurang, karena untuk pelaksana program PKH bisa saja di tiap kecamatan hanya ada satu petugas, hal ini mengharuskan pegawai bekerja *all-out* di lapangan, membuat tugas mereka menjadi cukup berat untuk mempertahankan kinerja yang baik walaupun mereka harus kerja *pontang-panting*, ditambah dengan dukungan daerah yang kurang terkait sarana dan prasarana, sehingga mereka menggunakan sarana dan prasarana milik pribadi. Dari segi pembagian tugas terdapat banyak pegawai yang merangkap diberbagai bidang namun dalam pelaksanaannya pegawai tetap profesional dalam melaksanakan tugas sehingga terciptanya kualitas kerja yang baik. Dalam pelaksanaannya terdapat kesimpulan sumber daya menjadi masalah serius dalam masalah ini, karena pelaksana kegiatan bergantung kepada ketersediaan sumber daya baik dalam hal pelaksanaan kegiatan secara langsung, maupun sumber daya pendukung seperti alat-alat, tempat, dan hal-hal lain yang bersifat sarana dan prasarana

3.2. Konteks Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kewenangan, kemudian kepentingan adalah yang melatarbelakangi pembentukan program, dan strategi aktor yang terlibat yang dimaksud disini adalah Bupati Berau dalam menjalankan visi misinya. Dalam pelaksanaannya Pada tahun 2020 Bupati Kabupaten Berau membentuk Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Sejalan ini Dinas Sosial Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai OPD yang berkewajiban menyalurkan Bantuan Sosial sesuai program yang telah dibentuk oleh pemerintah.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga atau rezim yang pada saat itu berkuasa sebagai tempat di mana implementasi kebijakan berlangsung, sejauh mana rezim politik dan organisasi administratif memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan yang menjadi komitmen mereka. Pertimbangan konteks tindakan administratif juga mengikat variabel-variabel seperti bentuk institusi politik dan bentuk rezim dimana kebijakan atau program tersebut dijalankan. Hal ini menjadi masalah adalah mungkin sejauh mana kegiatan implementasi harus didesentralisasi atau, di sisi lain, dikendalikan dari pusat politik atau birokrasi negara. Dalam pelaksanaannya semua komponen berperan dengan baik di wilayah kerja pemerintah kabupaten. Sejalan ini kami telah melaksanakan fungsi koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan asas demokrasi. Semua berperan aktif untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan sosial Covid-19, tidak terpaku kepada satu komando, namun berdasarkan landasan hukum.

c. Kepatuhan dan Responsif

Responsivitas dapat diartikan sebagai jika tujuan kebijakan tidak tercapai karena intervensi individu maupun kelompok yang sama, maupun untuk memperoleh jenis barang dan jasa tertentu dalam jumlah yang lebih besar atau untuk menghambat proses program tertentu yang mungkin tidak disukai oleh mereka sebagai manfaat. Dinas Sosial khususnya bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga selalu merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama pelayanan untuk mendapat bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Selama ini sudah ada beberapa masyarakat yang telah mendapatkan BANSOS Covid-19, namun ada masyarakat yang melapor dan belum terdata didalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan sampai sekarang belum ada *up-date* dari sistem dan Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial Covid-19, ada beberapa oknum RT yang dengan sengaja memasukkan nama keluarga oknum RT tersebut sebagai penerima bantuan sosial Covid-19 padahal nama tersebut tidak memenuhi indikator indikator sebagai penerima program bantuan Covid-19 dari pemerintah.

3.3. Faktor Penghambat Implementasi Implementasi kebijakan bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau

a. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan mengenai sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Berau berdasarkan hasil wawancara ialah kurangnya jumlah aparatur. Permasalahan ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi indikator penerima bantuan sosial. Kebutuhan untuk penambahan aparatur di UPTD yang ahli dalam penguasaan ilmu kesehatan, psikologi, dan pengajar keterampilan teknis untuk menambah kuantitas Sumber Daya Manusia agar tidak menjadi beban kerja yang besardengan keterbatasan pegawai yang ada.

b. Ketersediaan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau saat ini menjadi faktor utama penghambat dalam pendistribusian bantuan sosial Covid-19, seperti belum tersedianya ataupun kondisinya yang kurang baik sehingga tidak dapat dipergunakan dengan semestinya. Terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang terbatas dan kurang memadai sangat menghambat dalam pelaksanaan pelayanan, seperti misalnya gedung kantor yang sempit dan tidak adanya gedung untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Bahkan, untuk melakukan penyaluran, Dinas Sosial Kabupaten Berau harus meminjam gedung sekolah sebagai lokasi penyaluran bantuan sosial Covid-19. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah masih kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda, tidak tersedianya kendaraan dinas yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terdapat keperluan mendadak yang berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

c. Perbedaan data pusat dan daerah

Data yang ada di pusat sering berbeda dengan data yang ada di daerah. Proses pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) mengalami hambatan diantaranya data yang ada di pusat sering mengalami perbedaan terhadap data yang ada di Dinas Sosial hal ini berakibat dalam proses pendistribusiannya tidak merata sehingga banyak masyarakat yang seharusnya memiliki hak akan bantuan tersebut menjadi tidak mendapat bantuan dikarenakan ada oknum yang mendapat bantuan lebih.

d. Kelengkapan berkas dan syarat

Kelengkapan berkas atau syarat tidak di lengkapi bahkan hilangnyatanda pengenalan pada masyarakat serta mobilitas dalam pendistribusian terhalang beberapa oknum masyarakat. Sebelum mendistribusikan bantuan terdapat beberapa kelengkapan berkas atau syarat dalam pengambilannya kadang masyarakat kurang memperhatikan hal tersebut sehingga Dinas Sosial kembali bekerja ekstra membantu melengkapi sertaada juga yang kehilangan tanda pengenalan diri sehingga dari Dinas Sosial mengarahkan agar mengurusnya terlebih dahulu lalu kembali untuk melanjutkan pengambilan Bantuan tersebut. Mobilitas pendistribusian bantuan juga terhalang, maksud dari terhalang ialah beberapa oknum masyarakat yang kurang bersabar dalam pembagian sehingga membuatkeadaan kurang kondusif.

3.4. Faktor Pendukung Implementasi kebijakan bantuan Sosial Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau

- a. Dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pada BAB I Peraturan Bupati Berau No 27 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Gubernur tersebut dan pada Pasal 2 menjelaskan tentang Pedoman Bantuan tersebut. Dengan adanya Peraturan Bupati ini pelaksanaan penyaluran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati tersebut.
- b. Adanya dukungan masyarakat untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menyeleksi, menyaring dan menetapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pandemi Covid-19 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

3.5. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menyalurkan Bantuan Sosial Pandemi Covid-19

- a. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur H.M Agus Hari Kesuma dalam hal ini diwakilkan oleh Sekertaris H.M Yusuf membuka *FocusGroup Discussion (FGD)* yang digelar Inspektorat Jendral Kementrian Sosial Republik Indonesia, Kegiatan tersebut dilaksanakan atas Surat Edaran Sekertaris Jendral Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor: 2666/1/PR.01.01/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Monitoring Realisasi Bantuan Sosial TA 2021, tujuan dari kegiatan tersebut untuk memastikan ketepatan data penyaluran bantuan di lingkungan Kementrian Sosial RI di masing-masing Kabupaten/Kota, dan melakukan percepatan

pendistribusian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Serta memastikan agar bantuan sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPM dengan baik dan sesuai kebutuhan

- b. Pinjaman Modal Hingga Pelatihan Usaha dari Pemerintah. Pemerintah bermaksud memberikan peminjaman modal ke masyarakat yang ingin membangun usahanya. Selain diberikan pinjaman modal juga pemerintah memberikan pelatihan agar tidak dilepas begitu saja sehingga para calon pelaku usaha memiliki kemampuan lebih dalam membangun usahanya

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Bantuan sosial Covid-19 adalah salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang berdampak kepada seluruh sektor terutama perekonomian masyarakat, hal tersebut membuat pemerintah pusat sebagai komando kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Kabupaten Berau memberikan kebijakan dengan membuat aturan dalam pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Berau. Pada pelaksanaannya kebijakan pemberian bantuan sosial ini belum maksimal sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai dinas atau instansi yang diberi arahan langsung sebagai pengampu dari kebijakan ini. dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang membuat ketidakmaksimalan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan tersebut diantaranya pembagian yang tidak merata diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya yang ada baik dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dari Dinas Sosial. Hal itu terbilang berbanding terbalik dengan penelitian oleh Aldi Sajian (2021) yang mana program Bantuan Sosial Tunai yang hampir sama dengan kebijakan bantuan Sosial di Kabupaten Berau ini telah berjalan efektif diimplementasikan kepada masyarakat Kota Mataram.

Dalam implementasi kebijakan ini peran Dinas Sosial sangat diperlukan dan penting. Sebagai aktor langsung yang mengimplementasikan kebijakan tersebut, Dinas Sosial memulainya dari pendataan terlebih dahulu hingga sampai pelaksanaan pendistribusian yang langsung dilakukan juga oleh Dinas Sosial sama halnya dengan penelitian oleh Filsa Alviansyah (2019) dimana Dinas Sosial berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Dalam implementasinya yang belum maksimal, Dinas Sosial Kabupaten Berau langsung melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan selama pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial selama pandemi Covid-19 ini dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat serta pemberian modal. Karena pada dasarnya pemberian bantuan itu tidak serta merta bahan logistic saja tapi bantuan akan *skill* yang dapat merubah terutama sektor ekonomi selama pandemi ini.

Harapannya dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial terutama selama pandemi ini dapat berlangsung hingga pandemi selesai karena dapat dilihat sebelum hingga saat pandemi ini masyarakat Kabupaten Berau masih ada yang ekonominya belum secara penuh terpenuhi. Serta juga dengan implementasi kebijakan ini citra pemerintah dalam usaha membangun perekonomian yang terdampak Covid-19 ini dapat nyata terealisasi serta pemerintah benar-benar berupaya untuk

mensejahterakan warganya agar terhindar dari kekurangan terutama pada ekonomi mereka seperti halnya dalam penelitian Aji Dwi Utomo dkk yang mana pandangan masyarakat itu sangat penting terutama dalam menanggapi kinerja pemerintah yang berperan penting dalam perbaikan ekonomi dengan program bantuan sosial tunai di Kabupaten Jombang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Implementasi kebijakan bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau berjalan belum maksimal. Faktor faktor penghambatnya kurangnya sumber daya aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan data pusat dan daerah, kelengkapan dan syarat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau khususnya dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam mengatasi faktor penghambat dengan Pinjaman Modal Hingga Pelatihan Usaha dari Pemerintah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Grindle mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon: Boston London.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementations in the Third*. New Jersey: Princetown University Press.
- Kerlinger, F. N. (1986). *Foundation of Behavioral Research* (3 ed.). New York: Holt.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). *Designing Qualitative Research*.
- Masrul, Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, Sulaiman, O. K., Febrianty. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Neuman, W. L. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta:

Indeks.

Schaefer, H. E. (1987). Investigation of Thermal Equilibrium Vacancies in Metals by Positron Annihilation. *Physica Status Solidi. A, Applied Research*, 102(1), 47–65.

Seidel, J. (1998). Appendix E: Qualitative Data Analysis. *The Ethnograph* 4, 1–15.

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, W., & Setyoko, I. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: Alqaprint Jatinagor.

Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Dan/Atau Barang Dalam Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat

Aldi, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi COVID- 19 di Kota Mataram Tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Filsa, A. (2019). *Peran Dinas Sosial terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*

<https://covid19.kaltimprov.go.id/data-penularan-covid-19-provinsi-kalimantan-timurtanggal-5-september-2021> diakses pada 26 Agustus 2021

https://beraukab.go.id/v2/?page_id=5640 diakses pada 27 Maret 2022

https://dinsos.beraukab.go.id/artikel/artikel_detail/dinas-sosial-kab.-beraumendistribusikan-kks-bpnt-ppkm diakses pada 29 Maret 2022